

STUDI KOMPARASI TINGKAT INKLUSI KEUANGAN DI NEGARA ASEAN

Yana Raudhatul Jannah

Setyo Tri Wahyudi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Indonesia

Email: setyo81@gmail.com

Abstract

Financial inclusion programs in Asia began to intensify with focus on improving public access, especially those who have not yet enjoyed banking services. This makes financial inclusion one of the focuses of development in the financial sector in various countries, especially ASEAN, as a sound financial system can promote economic growth. This study aims to see the comparison of financial inclusion rates and see the effect of socio-economic variables on financial inclusion in ASEAN countries 2010-2015. In order to see the comparison of inclusion level of finance in each ASEAN country, the Index of Financial Inclusion (IFI) method was developed by Sarma (2008), while to examine the relationship between socio-economic variables to financial inclusion, the Ordinary Least Square (OLS) method was used estimation techniques in the Random Effects Model approach. The results show that in general, financial inclusion in ASEAN countries is mainly influenced by the dimension of a disorder. In addition, only per-capita GDP variables are not significant partially. While other variables, namely population over 15 years, unemployment rate, and the number of people in rural areas have a significant influence on index of financial inclusion.

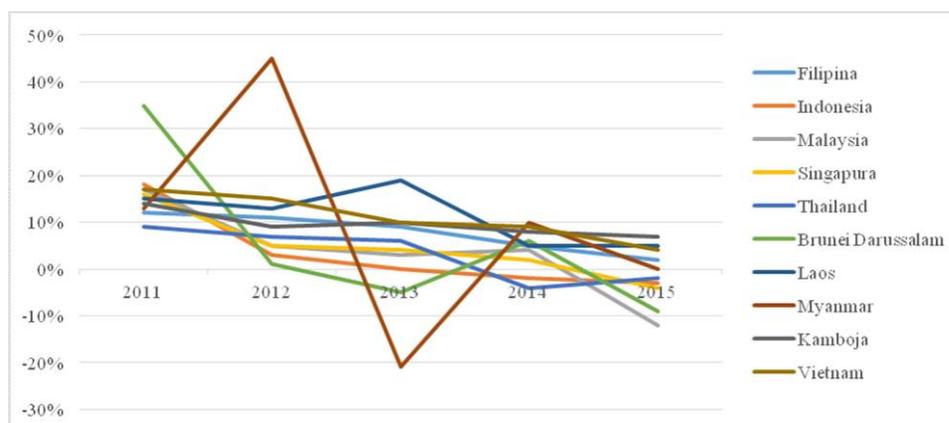
Keywords: financial inclusion, Index of Financial Inclusion

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2015 masih lemah, di mana pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang mencakup 70% pertumbuhan dunia menurun dalam lima tahun terakhir. Hal ini ditambah dengan perbaikan ekonomi di negara-negara maju. Harga komoditas energi yang rendah dan kebijakan moneter Amerika Serikat yang cukup ketat menjadi salah satu alasan perkembangan perekonomian global. Penyebab lainnya adalah Perlambatan dan *rebalancing* secara bertahap pada aktivitas perekonomian Cina (Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas 2015).

Sementara, pertumbuhan perlambatan di Cina juga menekan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia berkembang yaitu Asia Tenggara dan India. Sepuluh Negara ASEAN tumbuh 4,6% pada tahun 2015 dengan tingkat rata-rata tahunan 5,2% lebih pada tahun 2016-2020 (Organisation for Economic Co-operation and Development 2015).

Menurut data World Bank (2006) menyebutkan bahwa negara-negara ASEAN rata-rata mengalami pertumbuhan negatif dalam lima tahun terakhir (2011-2015). Selain karena aktivitas perekonomian Cina yang melambat, perlambatan pertumbuhan ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya dukungan sektor keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Sementara, International Monetary Fund (IMF) menyebutkan bahwa, kurang dari 20% masyarakat Kamboja memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Berbeda dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang lebih dari dua pertiga masyarakatnya memiliki akses terhadap jasa keuangan. Selain jumlah rekening, proporsi orang menabung di negara ASEAN lebih banyak dari jumlah proporsi orang meminjam kredit.

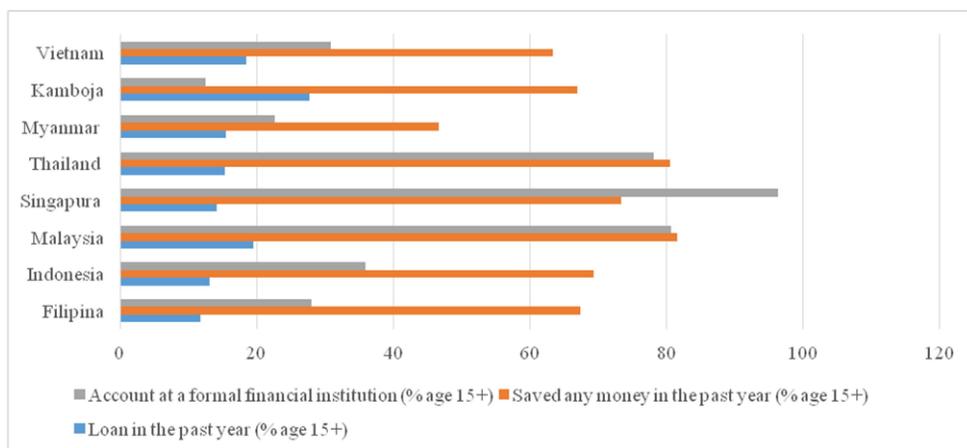


Sumber: World Bank, 2016 (diolah)

Gambar 1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN tahun 2011-2015 (persen).

Menurut gambar 2, beberapa masyarakat di negara ASEAN belum dapat menjangkau jasa keuangan formal, khususnya perbankan, disebut dengan *unbankable people*. Hal ini disebabkan karena banyak hambatan untuk mengaksesnya. Menurut Kunt (2008), pengetahuan masyarakat tentang fungsi lembaga keuangan dan ketidak sesuaian produk yang ditawarkan

oleh lembaga keuangan dengan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah menjadi salah satu penyebab dari hambatan tersebut (Dienillah and Anggraeni 2016). Selain itu hambatan juga berasal dari model bisnis bank itu sendiri, seperti posisi pasar, kondisi makroekonomi, tingkat kompetisi, serta peraturan yang dijalankan.



Sumber: International Monetary Fund, 2016 (diolah)

Gambar 2. Akses terhadap Jasa Keuangan di beberapa Negara ASEAN tahun 2015.

Untuk menghadapi hambatan-hambatan yang dihadapi maka perlu dilakukan peningkatan terhadap akses jasa keuangan melalui inklusi keuangan. Program inklusi keuangan di Asia mulai gencar dilakukan dengan fokusnya yaitu meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat yang belum menikmati jasa perbankan. Hal ini menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu fokus pembangunan di sektor keuangan diberbagai negara khususnya negara ASEAN, karena sistem keuangan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Demirgüç-Kunt, Beck and Honohan 2008).

Paska krisis 2008 istilah inklusi keuangan menjadi tren terutama berasal dari dampak krisis kepada kelompok masyarakat *in the bottom of the pyramid* (masyarakat pinggiran berpendapatan rendah, tinggal di daerah terpencil yang mempunyai identitas illegal) yang umumnya *unbankable* yang tercatat sangat tinggi pada negara miskin dan berkembang (Bank Indonesia 2016). Menurut *Reserve Bank of India*, inklusi keuangan merupakan suatu proses dalam mengakses produk dan layanan keuangan

yang tepat yang dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan biaya terjangkau yang diatur secara adil dan transparan. Definisi ini menekankan beberapa dimensi inklusi keuangan, yaitu aksesibilitas, ketersediaan dan sistem kegunaan (Demirgüç-Kunt, Beck and Honohan 2008). Dimensi ini secara bersama-sama membangun sistem keuangan yang inklusif.

Sistem keuangan merupakan inti dari proses pembangunan (Demirgüç-Kunt, Beck and Honohan 2008). Sehingga dengan adanya inklusi keuangan mampu memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah, dan pihak swasta. Beberapa manfaat yang akan didapat dengan adanya program inklusi keuangan antara lain, meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI), berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan, serta mengruangi kesenjangan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan kemiskinan.

Menurut Sarma (2012) dalam penelitiannya IFI merupakan ukuran multidimensi yang dikembangkan sejalan dengan indeks pembangunan terkenal seperti IPM, HPI, GDI, dan GEM. IFI dapat digunakan untuk membandingkan tingkat inklusi keuangan di negara yang berbeda dan untuk memantau sejauh mana kemajuan ekonomi sehubungan dengan indeks inklusi keuangan dari waktu ke waktu. Selain itu, Sarma mencari determinasi indeks inklusi keuangan dengan indikator pembangunan ekonomi, seperti variabel sosial ekonomi, variabel infrastruktur, dan variabel perbankan. Sedangkan dalam penelitian Sanjaya dan Nursechafia (2015) menyebutkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia utamanya dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas, serta dimensi lain seperti availibilitas dan penggunaan yang hanya memiliki proporsi yang cukup kecil, artinya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak sepenuhnya bisa mengakses jasa keuangan formal, khususnya dalam pengambilan kredit.

Mencermati penelitian-penelitian terdahulu yang ada dan beberapa fenomena yang telah dijelaskan membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana perbandingan tingkat inklusi keuangan dan variabel sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap inklusi keuangan di

negara-negara ASEAN. Selain itu, pada penelitian ini mengadopsi variabel sosial ekonomi dalam penelitian Sarma (2012) yang dilakukan di India.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan data *cross section* dan *time series*. Data panel tersebut berupa data *cross section* yang terdiri dari sepuluh negara di ASEAN yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Data *time series* tahunan periode tahun 2010-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat tahunan. Data-data ini dikumpulkan dari sumber seperti: *World Bank*, *International Monetary Fund (IMF)*, *Trading Economics*, dan sumber data lainnya. Selanjutnya, untuk menunjang literatur serta pengetahuan, penulis menggunakan literatur rambahan yang didapat dari jurnal dan penelitian ilmiah lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan bantuan *software Microsoft Excel 2013 dan Eviews 9*.

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis *Index of Financial Inclusion (IFI)* yang dikembangkan oleh Sarma (2008), digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di masing-masing negara ASEAN dan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dengan menggunakan teknik estimasi dengan pendekatan *Random Effects Model* akan digunakan untuk menguji hubungan antar variabel yang bersifat dependen dan memiliki beberapa varian (jenis) sehingga penulis bisa memiliki bentuk model yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Terakhir, dengan teknik regresi penulis dapat melihat dampak perubahan nilai variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu teknik regresi sangat membantu penulis yang membutuhkan alat untuk melakukan proyeksi (peramalan) (Prof. Gudono 2012).

a. *Index of Financial Inclusion (IFI)*

Menurut Sarma (2008) variabel keuangan inklusi dinilai dari tiga dimensi, pertama, penetrasi perbankan yang digambarkan oleh jumlah rekening depositu di bank komersial per 1000 populasi dewasa. Selanjutnya adalah ketersediaan jasa keuangan yang digambarkan oleh jumlah mesin ATM per 100000 populasi dewasa. Terakhir, kegunaan yang digambarkan oleh

proporsi kredit terhadap GDP. Sehingga untuk menghitung setiap dimensi digunakan rumus berikut:

$$d_i = \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i} \dots\dots\dots(1)$$

Di mana:

- A_i = nilai *_able_* dari dimensi i
- m_i = nilai minimal dari dimensi i
- M_i = nilai maksimum dari dimensi i

Persamaan (1) menghasilkan nilai, dimana semakin tinggi nilai d_i , maka semakin tinggi pula perolehan *_able_* di dimensi i. Jika terdapat n dimensi dari inklusi keuangan yang dihitung, maka perolehan suatu *_able_* dari dimensi tersebut dipresentasikan dengan titik $X = (d_{11}, d_{12}, d_{13}, \dots, d_{1n})$ pada ruang n-dimensi. Dalam ruang n-dimensi, titik $O = (0, 0, 0, \dots, 0)$ menunjukkan titik kondisi inklusi yang buru, sedangkan titik $I = (1, 1, 1, \dots, 1)$ menunjukkan kondisi yang ideal dalam setiap dimensi. Indeks inklusi keuangan, IFI, untuk *_able_* pada tahun ke i yang diukur dengan normalisasi terbalik Euclidean jarak pada titik D. Persamaannya adalah:

$$IFI_i = 1 - \frac{\sqrt{(1 - d_1)^2 + (1 - d_2)^2 + \dots + (1 - d_n)^2}}{\sqrt{n}} \dots\dots\dots(2)$$

Dalam persamaan (2), nilai IFI berada diantara 0 dan 1, jika diasumsikan seluruh dimensi memiliki bobot yang sama besar, maka masing-masing dimensi memiliki bobot sebesar 1, artinya dimensi memiliki peranan yang sama dalam menentukan tingkat inklusi keuangan.

Dalam perhitungan IFI, dibutuhkan nilai tetap dari M_i (batas atas) dan m_i (batas bawah) untuk setiap dimensi. Agar dapat membandingkan IFI antar tahun pada tiap *_able_*, maka batas atas maupun batas bawah harus dijadikan nilai tetap. Berikut ini merupakan data sebaran setiap dimensi yang disajikan dalam table 1.

Tabel 1. Sebaran setiap dimensi

Dimensi	Jumlah Observasi	Rataan	Standar Deviasi	Ketersediaan	
				Minimum	Maximum
Penetrasi perbankan Ketersediaan	60	9.11813	0.113109313	1.49	22.8
Jasa Perbankan	60	39.5037	32.04146757	0	113.54
Kegunaan	60	57.859	42.35681958	0	156.43

Sumber : data penelitian (2016)

Berdasarkan distribusi data di atas, penetrasi perbankan memiliki nilai maksimum sebesar 22,8, sehingga dibulatkan menjadi 23, artinya rata-rata setiap orang dewasa memiliki 23 rekening). Untuk jumlah mesin ATM, batas atasnya adalah 113,54, artinya dari 100.000 populasi dewasa dilayani oleh 112 mesin ATM). Terakhir adalah kegunaan, yaitu sebesar 156,43, artinya rata-rata deposito sebesar 156 persen terhadap GDP. Berikut adalah rangkuman dari seluruh dimensi yang digunakan dalam penelitian ini

Tabel 2. Dimensi dalam perhitungan IFI

Dimensi	Penetrasi Perbankan	Ketersediaan	
		Jasa Perbankan	Kegunaan
Indikator	Jumlah rekening depositu di bank komersial (per 1000 populasi dewasa)	Jumlah mesin ATM (per 100000 populasi dewasa)	Proporsi kredit terhadap GDP
Bobot (w_i)	1	1	1
Nilai Minimum (m_i)	0	0	0
Nilai Maksimum (M_i)	22.8	113.54	156.43

Sumber : data penelitian (2016)

b. Model Regresi *Ordinary Least Square* (OLS)

Langkah awal dalam estimasi data panel adalah perumusan model. Setelah merumuskan model yang akan digunakan, dilakukan pemilihan model pendekatan terbaik dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Selanjutnya dilakukan uji statistik (pengujian hipotesis individual (uji t), pengujian hipotesis berganda (uji f), dan uji koefisien determinasi (uji R^2)) dan uji ekonometrika (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas) guna memenuhi uji asumsi klasik.

Dalam menganalisis determinan inklusi keuangan terhadap indikator sosial ekonomi pada negara-negara ASEAN, maka digunakan variabel dependen *index of financial inclusion* (IFI). Variabel independennya yaitu GDP perkapita, jumlah penduduk di atas 15 tahun, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk di pedesaan. Sehingga persamaan regresinya yaitu:

$$IFI_{it} = \beta_0 + \beta_1 GDP_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 TP_{it} + \beta_4 JD_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots (3)$$

Di mana:

- IFI_{it} : indeks inklusi keuangan negara i tahun ke t
- GDP_{it} : GDP per kapita negara i tahun ke t
- JP_{it} : jumlah penduduk di atas 15 tahun negara i tahun ke t
- TP_{it} : tingkat pengangguran negara i tahun ke t
- JD_{it} : jumlah penduduk di pedesaan negara i tahun ke t
- β_0 : konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien arah garis regresi
- ε_{it} : error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perbandingan Indeks Inklusi Keuangan antar negara

Berikut ini akan dibahas ketiga dimensi dari indeks inklusi keuangan yang disajikan pada tabel 3. Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif IFI dengan tiga dimensi dari 10 negara anggota ASEAN yang telah diestimasi. Hasilnya menunjukkan beberapa indikator seperti: minimum (Min), maksimum (Max), rata-rata (Mean), dan Standar Deviasi. Secara rata-rata, jumlah IFI negara ASEAN adalah 0,286 pada tahun 2010 dan 0,36 pada tahun 2015. IFI cenderung berubah dengan fluktuasi kecil selama periode waktu tersebut.

Dari proporsi IFI tiga dimensi, dimensi kegunaan memiliki nilai yang paling tinggi, diikuti dengan ketersediaan jasa perbankan dan penetrasi perbankan. Hal ini mengindikasikan bahwa inklusi keuangan pada negara ASEAN ditentukan oleh dimensi kegunaan serta dimensi lain (ketersediaan jasa perbankan dan penetrasi perbankan) hanya memiliki proporsi yang lebih kecil. Salah satu kegunaan dari sistem keuangan oleh IMF diproporsikan dalam indikator proporsi kredit yang disalurkan terhadap GDP. Kredit/pinjaman ini digunakan oleh rumah tangga dan pengusaha.

Menurut Sarma (2012) jasa-jasa keuangan seperti penyaluran kredit, tidak digunakan dengan baik, walaupun masyarakat memiliki akses terhadap jasa keuangan.

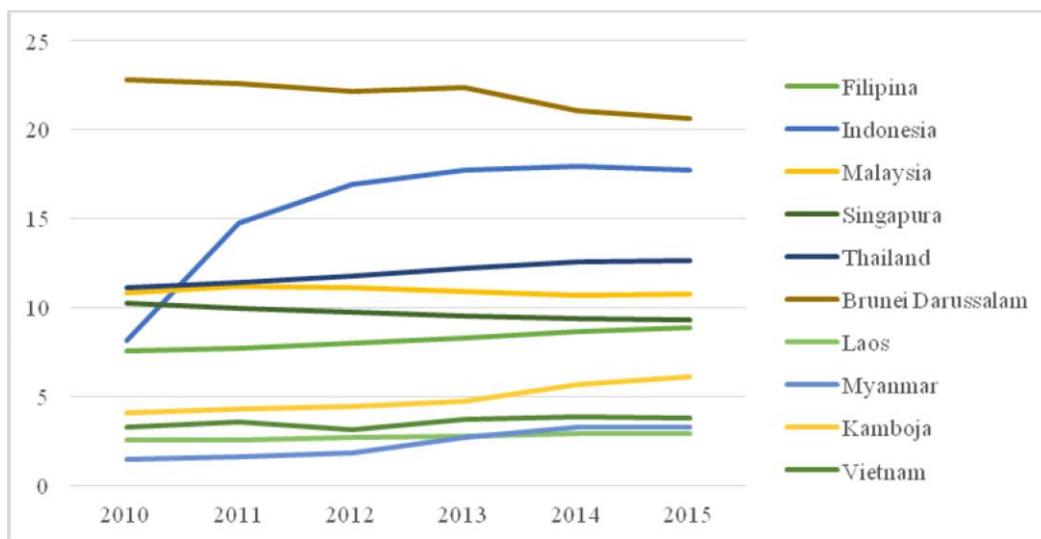
Tabel 2. Dimensi Pada Inklusi Keuangan

Stat.	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Inklusi Keuangan						
Min	0	0.002341	0.017474	0.037892	0.055179	0.059744
Max	0.521089	0.545939	0.551949	0.573622	0.589567	0.593417
Avg	0.286302	0.303529	0.323482	0.338955	0.350135	0.360279
St. Dev	0.20437	0.200359	0.19954	0.194693	0.185589	0.180029
Indeks Penetrasi perbankan						
Min	0	0.007039	0.015016	0.055373	0.066166	0.067574
Max	1	0.991084	0.969029	0.979352	0.917879	0.900047
Avg	0.315204	0.350962	0.361145	0.375223	0.381178	0.380948
St. Dev	0.29314	0.304461	0.310829	0.309641	0.290239	0.284452
Indeks Ketersediaan Jasa Perbankan						
Min	0	0	0.000793	0.005196	0.014444	0.016734
Max	0.726792	0.774705	0.840673	0.907169	0.980359	1
Avg	0.296873	0.310287	0.348797	0.362559	0.379117	0.389933
St. Dev	0.283434	0.283658	0.300227	0.292002	0.299988	0.296879
Indeks Kegunaan						
Min	0	0	0.036949	0.053954	0.067123	0.080483
Max	0.698971	0.77645	0.867736	0.976987	1	0.952631
Avg	0.315662	0.331644	0.357272	0.387394	0.403983	0.423276
St. Dev	0.257279	0.266885	0.273164	0.294945	0.297189	0.288816

Sumber : data penelitian (2016)

Pada dimensi penetrasi perbankan, proporsi orang dewasa miskin dapat mencapai aksesibilitas yang tinggi dalam sistem keuangan, namun mereka tidak menggunakan proporsi tersebut dengan baik karena adanya beberapa kendala, salah satunya berupa kantor cabang yang tidak dapat dijangkau dikarenakan tempat tinggal yang sangat terpencil sehingga mereka tidak bisa menjangkau akses tersebut. Proporsi populasi yang memiliki rekening bank merupakan sebuah ukuran dari penetrasi perbankan. Salah satu variabel yang digunakan adalah jumlah rekening depositu di bank komersial (per 1000 populasi dewasa). Brunei Darussalam

dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki tingkat penetrasi perbankan tertinggi dibandingkan sepuluh negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di kedua negara tersebut sedikit lebih banyak menggunakan akses perbankan khususnya untuk penggunaan rekening di bank umum.



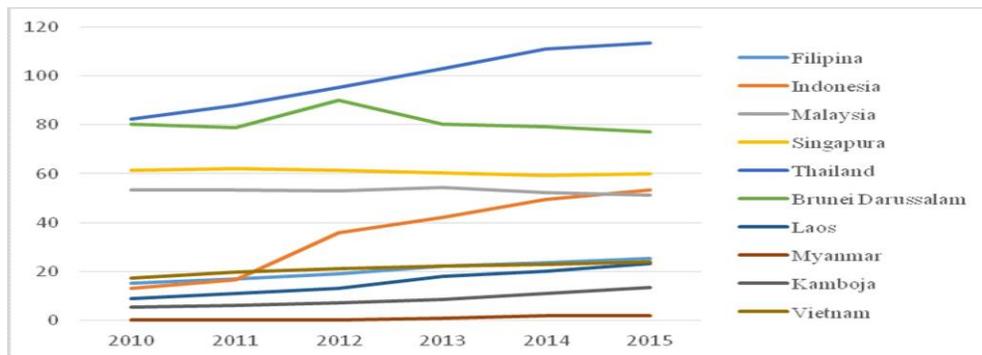
Sumber: World Bank, 2016 (diolah)

Gambar 3. Rata-rata Jumlah Rekening Deposito di Bank Komersial (per 1000 populasi dewasa)

Pada gambar 3, rata-rata jumlah rekening deposito di negara ASEAN mengalami tren peningkatan khususnya negara Indonesia, namun berbeda dengan negara Filipina yang memiliki tren negatif. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata negara ASEAN yang sebagian besar merupakan negara berkembang terus melakukan perbaikan dalam pembangunan sektor perbankan khususnya dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Selain penetrasi perbankan, dimensi lain dalam sistem inklusi keuangan adalah ketersediaan jasa perbankan. Dimensi ini mengukur sejauh mana kemudahan jasa perbankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Variabel yang digunakan untuk mengukur dimensi ini adalah jumlah mesin ATM (per 100000 populasi dewasa). Dalam dimensi ini, negara Brunei Darussalam tetap memiliki proporsi terbesar dalam memiliki jumlah mesin ATM, disusul Filipina yang memiliki jumlah dan

tren peningkatan terbesar dibandingkan negara lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh gambar 4.

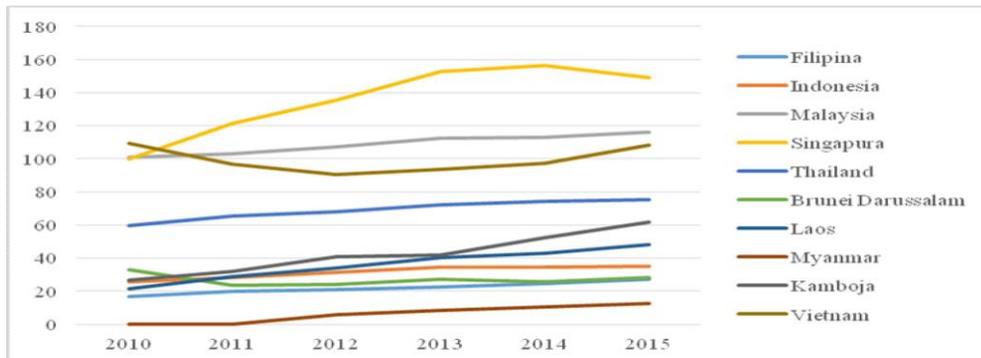


Sumber: World Bank, 2016 (diolah)

Gambar 4. Rata-rata Jumlah mesin ATM (per 100000 populasi dewasa)

Untuk negara ASEAN lainnya, jumlah mesin ATM dari bank komersial di negara tersebut cenderung konstan dari tahun 2010-2015. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik berupa mesin ATM yang merupakan akses dari sektor perbankan tidak lagi dilakukan. Hal ini juga mencerminkan terjadinya penurunan dalam perkembangan teknologi. Salah satu alternatif untuk mengganti jumlah mesin ATM dengan menggunakan sistem *mobile banking* dan *internet banking*. Sehingga dapat mengurangi biaya produksi dari suatu perbankan dan nasabah tidak perlu datang ke bank terdekat dalam melakukan transaksi perbankan.

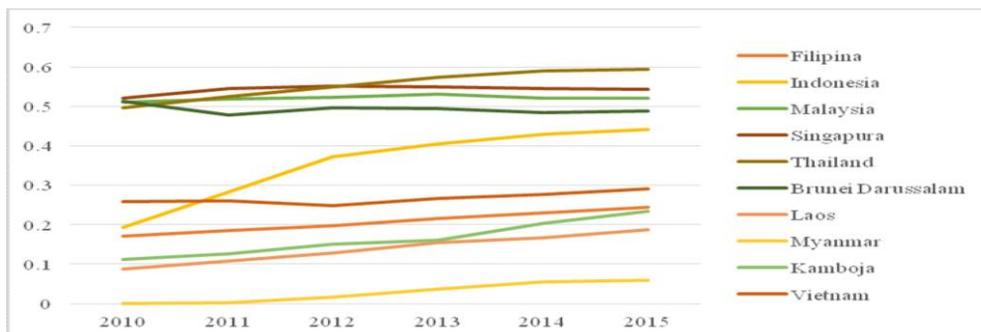
Dimensi terakhir dari inklusi keuangan adalah kegunaan. Bank sebagai pihak intermediasi seharusnya memiliki manfaat bagi masyarakat. Salah satu bentuk intermediasi perbankan berupa penyaluran kredit. Dalam penelitian ini, kegunaan dilihat dari proporsi jumlah kredit/pinjaman oleh rumah tangga dan perusahaan terhadap GDP. Dalam gambar 5, Singapura dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki jumlah proporsi kredit terbesar dibandingkan negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin besar jumlah proporsi kredit yang disalurkan maka peningkatan GDP akan semakin besar dengan semakin meningkatnya jumlah konsumsi dari masyarakat.



Sumber: World Bank, 2016 (diolah)

Gambar 5. Rata- rata Proporsi Kredit terhadap GDP

Gambar 6 menyajikan nilai IFI dari negara ASEAN tahun 2010-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa negara ASEAN memiliki tren indeks inklusi keuangan yang meningkat. Pada periode terakhir, Singapura memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang paling tinggi selama periode tersebut, yaitu sebesar 0,551, selanjutnya disusul oleh Kamboja (0,543) dan Filipina (0,513). Tingginya indeks inklusi keuangan di negara tersebut menunjukkan adanya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses jasa keuangan. Dimana jasa perbankan telah dan sedang menjangkau mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Singapura, Kamboja, dan Filipina sudah mampu menghilangkan hambatan-hambatan dalam akses jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan jasa-jasa yang diberikan oleh keuangan formal, khususnya jasa perbankan. Di mana, jasa perbankan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ideal.



Sumber: Data Penelitian, 2016 (diolah)

Gambar 6. Nilai IFI negara ASEAN tahun 2010-2015

Sedangkan negara dengan indeks inklusi keuangan terendah dengan nilai sebesar 0,002 adalah Malaysia. Rendahnya indeks inklusi keuangan di negara ini menunjukkan masih sulitnya akses terhadap jasa perbankan. Namun demikian, negara ini memiliki kecenderungan dalam memperbaiki akses sektor perbankan secara annual. Perbaikan dalam usaha untuk menghilangkan hambatan akses jasa keuangan tersebut seperti, meningkatkan jumlah cabang bank khususnya untuk yang berada di wilayah pedesaan, pemberian kredit kepada UMKM, menambahkan produk-produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan, dan lain sebagainya.

b. Pengaruh Variabel Sosial Ekonomi terhadap Inklusi Keuangan

Menurut Sarma (2012) ada beberapa indikator pembangunan yang mempengaruhi inklusi keuangan di suatu negara, yaitu seperti indikator variabel sosial ekonomi, variabel infrastruktur, dan variabel perbankan. Namun dalam penelitian ini indikator pembangunan yang dianalisis hanya dilihat dari variabel sosial ekonomi. Sehingga, untuk mengetahui pengaruh variabel social ekonomi terhadap indeks inklusi keuangan maka dilakukan estimasi dengan regresi data panel dengan hasil setimasi sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP	-0.001130	0.001861	-0.607087	0.5463
JP	0.022481	0.008844	2.541885	0.0139
TP	-0.026532	0.013212	-2.008159	0.0495
JD	-0.005959	0.002002	-2.977210	0.0043
C	-0.815983	0.680469	-1.199147	0.2356
R-squared	0.779559	Mean dependent var		0.031671
Adjusted squared	R- 0.741709	S.D. dependent var		0.041397
S.E. of regression	0.030932	Sum squared resid		0.052622
F-statistic	12.66991	Durbin-Watson stat		2.091073
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : data penelitian (2016)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4 dengan α sebesar 5%, didapatkan bahwa variabel GDP perkapita dapat dipengaruhi secara tidak signifikan

oleh indeks inklusi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien GDP perkapita, di mana nilai koefisien sebesar 0.001130 di bawah nilai α .

Jumlah penduduk di atas 15 tahun signifikan memengaruhi positif terhadap indeks inklusi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien jumlah penduduk di atas 15 tahun yang signifikan pada α , yaitu dengan nilai koefisien sebesar 0.022481. Artinya, apabila Jumlah penduduk di atas 15 tahun meningkat sebesar 1 persen, maka indeks inklusi keuangan akan meningkat sebesar 0.022481. Jadi, jumlah penduduk dapat menjelaskan kondisi inklusi keuangan pada negara ASEAN. Dimana, semakin tinggi jumlah penduduk pada negara ASEAN, semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangannya. Pertumbuhan penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena penduduklah yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi dan konsumsi. Penduduk, khususnya penduduk produktif, dipandang sebagai nasabah yang akan melakukan kegiatan menabung. Menurut Kasmir, sumber modal utama perbankan berasal dari masyarakat yaitu berupa dana pihak ketiga. Sehingga semakin banyak jumlah penduduk makin tinggi pula dana pihak ketiga yang dihimpun oleh sektor perbankan (Kasmir 2004). Hal tersebut menjadi stimulus dalam penerapan program inklusi keuangan. Dengan demikian, semakin banyak jumlah penduduk produktif di negara ASEAN, maka semakin besar pula dorongan untuk mensukseskan program inklusi keuangan.

Tingkat pengangguran signifikan memengaruhi negatif terhadap indeks inklusi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien jumlah penduduk di atas 15 tahun yang signifikan pada α , yaitu dengan nilai koefisien sebesar 0.026532. Artinya, apabila tingkat pengangguran meningkat sebesar 1 persen, maka indeks inklusi keuangan akan menurun sebesar 0.026532. Jadi, tingkat pengangguran dapat menjelaskan kondisi inklusi keuangan pada negara ASEAN. Dimana, semakin tinggi jumlah penduduk pada negara ASEAN, semakin rendah tingkat inklusi keuangannya. Menurut Goodwin (2000) faktor yang dapat dikaitkan dengan inklusi keuangan adalah angkatan kerja. Pengangguran atau mereka yang memiliki pekerjaan tidak tetap dan tidak aman cenderung untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan. Beberapa studi menemukan bahwa pembayaran upah melalui transfer tunai otomatis telah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi inklusi keuangan (Sarma and Pais, *Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis* 2012). Selain itu, dengan

banyaknya angkatan kerja yang bekerja di lapangan kerja sektor formal bisa menyiratkan partisipasi dalam sistem keuangan formal melalui penerimaan upah dan gaji dengan sistem transfer tunai tersebut. Dengan demikian proporsi tenaga kerja sektor formal akan menjadi indikator penting dari tingkat inklusi keuangan. Sehingga, semakin kecil jumlah pengangguran, maka semakin besar peluang dalam mengakses jasa perbankan, hal ini akan meningkatkan tingkat inklusi keuangan pada negara ASEAN.

Jumlah penduduk di pedesaan signifikan memengaruhi negatif terhadap indeks inklusi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien jumlah penduduk di atas 15 tahun yang signifikan pada α , yaitu dengan nilai koefisien sebesar 0.005959. Artinya, apabila jumlah penduduk di pedesaan meningkat sebesar 1 persen, maka indeks inklusi keuangan akan menurun sebesar 0.005959. Jadi, jumlah penduduk di pedesaan dapat menjelaskan kondisi inklusi keuangan pada negara ASEAN. Dimana, semakin tinggi jumlah penduduk pada negara ASEAN, semakin rendah tingkat inklusi keuangannya. Menurut Leyshon (1995), masyarakat pedesaan memiliki kecenderungan kecil dalam mengakses jasa keuangan. Kebanyakan daerah pedesaan merupakan daerah dengan infrastruktur yang buruk, menyebabkan sulitnya dalam menyediakan jasa keuangan. Jika akses keuangan terjangkau, hal ini akan menimbulkan biaya transaksi yang cukup besar bagi penyedia jasa keuangan, sehingga penyedia jasa keuangan sulit dalam merencanakan dan membuka akses keuangannya di pedesaan. Selain besarnya biaya transaksi, produk-produk yang ditawarkan oleh jasa keuangan pun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, semakin sedikitnya jumlah masyarakat di pedesaan, maka akses jasa keuangan semakin mudah, sehingga meningkatkan tingkat inklusi keuangan.

Pada tabel 4 dapat diketahui pula koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.779559 atau sebesar 77,9%. Ini berarti bahwa kontribusi dari variabel GDP perkapita, jumlah penduduk di atas 15 tahun, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk di pedesaan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel indeks inklusi keuangan sebesar 77,9%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 22,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan regresi pada penelitian ini.

Uji F statistik digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil didapatkan F hitung sebesar 12,66991, dengan Sig F (0,000) yang lebih kecil dari 5% (0,05) menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel variabel GDP perkapita, jumlah penduduk di atas 15 tahun, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk di pedesaan secara bersama sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel indeks inklusi keuangan.

SIMPULAN

Penelitian ini mencoba untuk menjadi alat penting bagi pengambil kebijakan untuk menggunakannya sebagai perbandingan dan motivasi untuk semakin menganut prinsip inklusif dalam keuangan. Artikel ini memberikan paling tidak dua kesimpulan, *pertama*, perbandingan indeks inklusi keuangan antar negara ASEAN dengan menggunakan dimensi penetrasi perbankan ketersediaan jasa perbankan, dan kegunaan. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum inklusi keuangan di negara ASEAN utamanya dipengaruhi oleh dimensi kegunaan. Salah satu kegunaan dari sistem keuangan oleh IMF diproporsikan dalam indikator proporsi kredit yang disalurkan terhadap GDP. Kredit/pinjaman ini digunakan oleh rumah tangga dan pengusaha. Jasa-jasa keuangan seperti penyaluran kredit, tidak digunakan dengan baik, walaupun masyarakat memiliki akses terhadap jasa keuangan.

Kedua, melihat pengaruh indikator pembangunan berupa variabel sosial ekonomi terhadap indeks inklusi keuangan di sepuluh negara ASEAN pada periode 2010-2015. Dapat disimpulkan bahwa hanya variabel GDP perkapita yang tidak signifikan berpengaruh secara parsial. Sedangkan variabel lainnya, yaitu jumlah penduduk di atas 15 tahun, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk di pedesaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks inklusi keuangan. Selanjutnya, dapat diketahui bahwa dari keempat variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap indeks inklusi keuangan adalah jumlah penduduk di pedesaan karena memiliki nilai koefisien paling besar.

Mengacu pada kesimpulan di atas, beberapa implikasi dan saran yang dapat diberikan, pertama bagi negara ASEAN, peningkatan inklusi keuangan harus diikuti oleh penurunan hambatan dalam mengakses

layanan jasa-jasa keuangan formal serta menambah produk perbankan yang lebih sesuai khususnya dengan masyarakat berpendapatan rendah. Misalnya kredit mikro untuk usaha kecil dan menengah dan menambah outlet perbankan yang menjangkau pedesaan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya inklusi keuangan, dengan demikian masyarakat akan merasa bahwa jasa keuangan sangat penting dan dekat dalam jangkauannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2016. *Keuangan Inklusi*. Accessed Desember 17, 2016. <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusi/Indonesia/Contents/Default.aspx>.
- Demirgüç-Kunt, Asli, Thorsten Beck, and Patrick Honohan. 2008. *Finance for all? Policies and Pitfalls in Expanding Access*. The International Bank for Reconstruction and Development, Washington DC: The World Bank.
- Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas . 2015. *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia*. Laporan Triwulan IV tahun 2015, Jakarta: Deputi Bidang Ekonomi Bappenas.
- Dienillah, Azka Azifah, and Lukytawati Anggraeni. 2016. "Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Volume 18, Nomor 4.
- Goodwin, D., L. Adelman, S. Middleton, and K. Ashworth. 2000. "Debt, Money Management and Access to Financial Services: Evidence from the 1999 PSE Survey of Britain." *1999 PSE Survey Working Paper 8*, Centre for Research in Social Policy (Loughborough University).
- International Monetary Fund. 2016. *IMF Finance*. International Monetary Fund. <http://www.imf.org/external/index.htm>.
- Kasmir. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Leyshon, A., and Thrift N. 1995. "Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States." *Transactions of the Institute of British Geographers* .

- Organisation for Economic Co-operation and Development. 2015. *The OECD Economic Outlook*. Economic Outlook, OECD Development Centre. <http://www.oecd.org/>.
- Prof. Gudono, Ph.D., CMA. 2012. *Analisis Data Multivariat*. Yogyakarta: BPFPE.
- Sanjaya, I Made, and Nursechafia. 2015. "INKLUSI KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN INKLUSIF: ANALISIS ANTAR PROVINSI DI INDONESIA." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 3.
- Sarma, Mandira. 2008. "Index of Financial Inclusion." *Indian Council for Research on International Economic Relations*.
- Sarma, Mandira, and Jesim Pais. 2012. "Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis ." *Indian Council for Research on International Economic Relations*.
- The World Bank. 2016. *World Bank Open Data*. Accessed Desember 15, 2016. <http://data.worldbank.org/>.
- Trading Economics. 2016. *Loans to Bank*. Accessed Desember 15, 2016. www.tradingeconomics.com..